

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Holden atau yang dikenal sebagai General Motors-Holden adalah sebuah manufaktur kendaraan yang ikonik dari Australia. Faktanya, Holden adalah manufaktur kendaraan yang berafiliasi dengan perusahaan General Motors, salah satu raksasa otomotif terbesar dan berpengaruh di AS. Sejak awal abad ke-20, Holden telah dipercaya untuk menjadi perusahaan karoseri kendaraan untuk memproduksi mobil keluaran General Motors untuk merakit chasis, kerangka, dan mesin kendaraan (Darwin, 2002: 4). Pada perkembangannya, Holden kemudian dikenal sebagai manufaktur kendaraan bermotor yang berhasil menciptakan dan menjaga identitas mereka sebagai sebuah merk tersendiri, meskipun sebenarnya mereka tetap menjadi perusahaan yang memproduksi mobil buatan General Motors.

Sejak tahun 1950an hingga era 1970an, Holden berkembang pesat menjadi produsen mobil yang ikonik dan mendominasi pasar otomotif Australia. Holden terus berkembang pesat dan berkuasa sepanjang tahun 1950an dan 60an (The Guardian, 2020). Holden mengalami kesuksesan dengan produk yang populer dan laris terjual di kalangan masyarakat (Holden, 2020). Sebagai anak perusahaan General Motors, Holden telah sukses menciptakan mobil-mobil ikonik bertenaga besar dengan gabungan gaya Eropa, bermesin V-6 dan V-8 ala Amerika, dan tanpa terkendala oleh emisi yang berlebihan (Meiners, 2020). Singkatnya, dengan

kesuksesan penjualan dan mendominasi pasar domestik Holden telah menjadi DNA dari otomotif Australia yang ikonik.

Namun, kejayaan Holden sejak tahun 1950-an, sampai dengan 1970-an, tidak bertahan lama. Nasib Holden mulai berubah sejak pertengahan 1980-an. Pemerintah federal pada saat itu meresmikan Button Car Plan, yang diinisiasikan oleh Senator John Button pada 1985. Sejak diberlakukannya Button Car Plan, Holden mengalami kesulitan untuk bersaing dengan kompetitornya dan mengalami keterbatasan untuk mengembangkan model andalannya. Lalu, kerugian finansial terbesar Holden berada sejak pertengahan dekade 2000-an hingga awal dekade 2010an dengan total kerugian sebesar ratusan juta dollar Australia tiap tahunnya. Puncaknya, pada tahun 2013 pemerintah federal telah menolak untuk memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan untuk mendukung operasional dari Holden (Morley, 2020).

Persaingan pasar otomotif yang sangat kompetitif pada kawasan Asia-Pasifik serta menurunnya kredibilitas Holden hanyalah salah satu dari sekian faktor yang dinilai memundurkan bisnis Holden di Australia. Pada akhirnya, General Motors sebagai induk perusahaan Holden memutuskan untuk berhenti bermitra dengan Holden. Keputusan ini memang diakibatkan oleh General Motors yang kesulitan dalam menopang operasi bisnis dari Holden yang hanya berada di dua negara saja (Kompas, 2020). Hal yang menarik kemudian adalah kemungkinan hadirnya dimensi politik yang juga ikut mempengaruhi dan menjadi alasan mengapa pemerintah yang tidak lagi sepenuhnya mendukung Holden untuk tetap eksis di negeri Kangguru. Sebab, Senator Kim Carr, selaku politisi Partai

Buruh telah menegaskan bahwa Perdana Menteri Tony Abbott dan Partai Koalisi pemerintahan telah menekan Holden untuk segera tutup (Carr, 2017). Dengan kata lain, penghentian operasional Holden secara luas juga disebabkan oleh faktor politis, tidak hanya sekedar persoalan bisnis, manajemen produk, serta perubahan selera konsumen (Morley, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis faktor-faktor berhenti produksinya manufaktur Holden melalui kajian yang bersifat politis. Selain persoalan bisnis dan perdagangan, fenomena ini juga membuktikan eksistensi dari kepentingan pemerintah yang mendorong Holden untuk segera tutup. Di sisi lain, penulis ingin memahami relevansi ilmu hubungan internasional dalam menganalisis fenomena-fenomena yang berkaitan dengan industri otomotif. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya khazanah pengetahuan dan implikasi kebijakan pemerintah dalam industri otomotif sebagai manfaat praktisnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian, yakni: “Mengapa faktor politis ikut menjadi penyebab penghentian operasional Holden di Australia?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ilmu hubungan internasional memandang fenomena yang berkaitan dengan industri otomotif.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa faktor politik berpengaruh terhadap keputusan penghentian operasional Holden di Australia.

1.4. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka tulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi akademis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Akademis

Penelitian ini memberikan manfaat akademis bahwa hasil dari penelitian ini mampu melengkapi kajian penelitian dan literatur dalam hubungan internasional, khususnya penelitian yang menjadikan otomotif sebagai objek utamanya. Manfaat akademis lainnya yang didapatkan dari penelitian ini adalah menambah literatur-literatur otomotif yang ditinjau melalui perspektif hubungan internasional, tidak hanya melalui perspektif ekonomi.

1.4.2. Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pemerintah Indonesia. Sebab, Indonesia telah berusaha mengembangkan industri otomotif nasional melalui pabrikan kendaraan ESEMKA, Gesits, dan sebagainya. Penelitian ini menyajikan fakta bahwa keberlangsungan industri otomotif juga melibatkan peran para pemangku kebijakan, serta peran para elit politik dalam proses pengambilan keputusan melalui kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam implikasinya, fenomena penghentian suatu manufaktur kendaraan tidak hanya sekedar fenomena ekonomi dan perdagangan saja. Melainkan sebuah fenomena yang bersifat politis, melalui kebijakan pemerintah dalam suatu negara.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian terkait penghentian operasional Holden tampaknya sudah cukup banyak dibahas. Sebab, fenomena penghentian operasional manufaktur Holden merupakan salah satu fenomena yang besar dalam industri otomotif. Pasalnya, Holden merupakan pabrikan mobil yang legendaris dan ikonik, khususnya sebagai representasi dari budaya otomotif Australia. Tak heran jika banyak perbincangan ataupun perdebatan yang merespons fenomena penghentian operasional Holden. Namun demikian, peneliti akan menganalisis fenomena ini melalui perspektif hubungan internasional, yakni memandang fenomena penghentian operasional Holden melalui perspektif yang bersifat politis.

Penelitian pertama yang menjadi referensi penulisan, yakni sebuah jurnal yang ditulis oleh Stephen Clibborn¹ dan kawan-kawan dengan judul jurnal “*Who Killed the Australian Automotive Industry: The Employers, Government or Trade Unions?*”. Berdasarkan jurnal Clibborn et al (2016), penelitian mereka cenderung lebih menggunakan pisau analisis yang berfokus pada persoalan perekonomian, khususnya perdagangan dan proses industri. Adapun pisau analisis yang mereka gunakan, yakni konsep *tariff protection* dan *industry assistance*, fluktuasi mata uang, keputusan strategis global, dan pengaturan kebijakan industrial. Dan singkatnya, terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan dalam yang menyebabkan tutupnya operasional manufaktur Holden. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa akar masalah dari fenomena ini disebabkan akibat menurunnya daya saing perusahaan Holden untuk bersaing dengan kompetitornya. Dengan demikian, berdasarkan empat konsep yang telah digunakan, mereka mengelaborasi penelitian dengan menjelaskan faktor perekonomian dan manajemen industri terhadap runtuhnya produk otomotif nasional Australia.

Adapun penelitian kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Abbas Valadkhani² dan Russel Smyth³ dengan judul “*The Effects of the Motor Vehicle Industry on Employment and Research Innovation in Australia*”. Berdasarkan jurnal Valadkhani & Smyth (2016), penelitian mereka menggunakan pisau

¹ Seorang akademisi *Discipline of Work and Organisational Studies University of Sydney* (Clibborn, 2016).

² Seorang Akademisi *Accounting, Economics, and Finance Swinburne University of Technology* (Valadkhani & Smyth, 2016).

³ Seorang Akademisi *Departement of Economics Monash University* (Valadkhani & Smyth, 2016).

analisis yang berfokus pada persoalan perekonomian, khususnya manajemen manufaktur. Adapun pisau analisis yang mereka gunakan ialah konsep *supply and demand*. Berdasarkan konsep yang telah mereka gunakan, mereka mengelaborasi penelitian dengan menjelaskan latar belakang penurunan performa manufaktur Holden untuk bersaing dengan kompetitornya melalui perspektif perekonomian. Jurnal ini menjelaskan dampak ekonomi terhadap penutupan manufaktur Holden pada pasar otomotif Australia menggunakan tabel *input-output* (IO). Adapun subjek yang mereka teliti, yakni karyawan dan manufaktur perusahaan Holden. Terlebih lagi, jurnal ini meneliti dampak penutupan operasional Holden terhadap sektor lapangan kerja di Australia. Dengan demikian, dari pisau analisis yang mereka gunakan jurnal ini dapat menyimpulkan bahwa minimnya inovasi, beserta *research and development* (R&D) perusahaan merupakan kausalitas utama dari penutupan operasional Holden.

Kedua penelitian terdahulu diatas memang berfokus untuk meneliti faktor kausalitas dibalik fenomena penghentian operasional Holden. Jurnal karya Clibborn et al (2016) berfokus pada faktor perekonomian, dan sedikit mengulas peran pemerintah yang tidak lagi mendukung eksistensi dari Holden. Sedangkan, jurnal karya Valadkhani & Smyth (2016) berfokus pada faktor-faktor ekonomi dan bisnis dari industri otomotif. Kedua penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa akar permasalahan dari fenomena ini merupakan persoalan ekonomi, termasuk untung dan rugi. Adapun perbedaan terhadap kedua penelitian terdahulu yang penulis lakukan, yaitu membuktikan bahwa faktor politik juga

merupakan suatu kausalitas yang telah membunuh Holden. Untuk menjelaskan fenomena ini, variabel yang digunakan adalah politik dan ekonomi. Pembatasan ini ditujukan dengan maksud agar penelitian ini menjelaskan secara detail fenomena yang berkaitan dengan industri otomotif melalui perspektif hubungan internasional. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor politis yang mempengaruhi keberlangsungan suatu entitas perekonomian. Untuk mencari jawaban atas permasalahan diatas, penulis akan menggunakan beberapa konsep.

Adapun penelitian menggunakan konsep Ekonomi Politik Internasional sebagai alat analisis utama faktor kausalitas dari keputusan penghentian operasional Holden. Entitas antara ekonomi dan politik memiliki sifat yang interdependensi serta saling keterkaitan. Seperti halnya berbicara mengenai industri otomotif, industri memiliki keterkaitan maupun ketergantungan dengan peran para pemangku kebijakan di negara setempat. Dengan demikian, landasan konseptual Ekonomi Politik Internasional juga meliputi konsep peran negara terhadap pasar, teori perdagangan internasional, serta kebijakan pemerintah terhadap industri. Konsep ini diuraikan sebagai berikut:

1.5.1. Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi Politik Internasional adalah sub disiplin ilmu Hubungan Internasional yang membahas mengenai interaksi, keterkaitan, hubungan, maupun pengaruh antara faktor-faktor ekonomi dan politik. Sebagai landasan utama penelitian, teori Ekonomi Politik Internasional berfokus pada analisis interaksi antara pasar dan negara. Walaupun analisis melalui perspektif ilmu ekonomi adalah pondasi terpenting dalam menganalisis fenomena-fenomena ekonomi politik

internasional, akan tetapi tulisan ini berfokus terhadap interaksi dari pasar dan aktor politik. Menurut Robert Gilpin (2001: 23) dalam bukunya yang berjudul “*Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*” menjelaskan bahwa entitas ekonomi sendiri kurang relevan dan kurang akurat dalam menganalisis aktivitas perekonomian internasional, serta kausalitas antara perekonomian dunia dengan kepentingan nasional. Dan singkatnya, konsep ini menjelaskan interaksi pada fenomena perekonomian sebagai hal yang bersifat politik.

Ekonomi dunia ditentukan oleh dua determinan, yakni pasar dan kebijakan dari suatu negara. Pada faktanya, pasar merupakan entitas dengan andil yang kuat dalam penentuan urusan ekonomi dan politik (Gilpin, 2001: 24). Dalam implikasinya, negara menetapkan seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh pengusaha, baik individu maupun perusahaan multinasional. Kekuatan ekonomi dan kemajuan teknologi telah membentuk kebijakan dan kepentingan masing-masing negara serta hubungan politik di antara mereka. Dengan demikian, ekonomi politik internasional menjelaskan berbagai keterkaitan antara faktor-faktor ekonomi dan politik, yakni melalui analisis pasar dan negara dalam kajian hubungan internasional. Dan negara, sebagai aktor terkuat, menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian dalam hal untuk mencapai kepentingan perekonomian dan kepentingan politiknya (Gilpin, 2001: 102).

Peran krusial negara sebagai aktor ekonomi dan politik, yakni negara memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan moneter. Negara dapat

menciptakan uang sebagai alat tukar, nilai tukar, serta sebagai alat terpenting dalam proses pembentukan kebijakan moneter. Melalui pemerintahannya, negara dapat memegang kendali terhadap pasar. Menurut Gilpin (2001: 151), negara dapat menentukan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, mengendalikan neraca keuangan, serta melegitimasi perekonomian. Oleh sebab itu, negara merupakan entitas yang pada dasarnya mengendalikan dinamika perekonomian. Adapun teori Ekonomi Politik Internasional dalam hubungan internasional juga meliputi konsep pengambilan keputusan pemerintah terhadap pasar, kebijakan pasar bebas, serta kebijakan pemerintah terhadap industri. Terlebihnya lagi, penulis akan memperjelas konsep Ekonomi Politik Internasional secara terperinci sebagai landasan konseptual penelitian ini

1.5.2. Pengambilan Keputusan Pemerintah terhadap Pasar

Adapun penelitian ini juga akan menjadikan kebijakan pemerintah sebagai pisau analisis utama. Konsep ini bermula dari adanya pasar bebas, sebagai hal yang akan tidak luput dari keterlibatan pemerintah. Mengingat, pasar bebas memiliki korelasi terhadap pemerintahan dan rezim internasional. Friedman (1962: 17) dalam bukunya yang berjudul "*Capitalism and Freedom*" menjelaskan bahwa peran pemerintah khususnya dalam aktivitas masyarakat memang sangat dibutuhkan karena kebebasan mutlak adalah hal yang tidak mungkin. Pemerintah memiliki peran krusial sebagai pihak yang menentukan "*rules of the game*", serta berperan sebagai hakim yang menafsirkan dan menegakan seperangkat aturan yang telah ditetapkan (Friedman, 1962: 21).

Melalui analisis yang bersifat politis, peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan cenderung memaksa kesesuaian pasar yang substansial dengan kebutuhannya. Segala aktivitas yang terjadi pada pasar, adalah sebuah fenomena-fenomena yang harus diputuskan melalui cara-cara yang politis. Dengan mempertimbangkan sejauh mana peran pemerintah untuk berpartisipasi secara langsung dalam dinamika pasar (Friedman, 1962: 21). Dapat dikatakan, bahwa pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan untuk melegitimasi keberlangsungan roda perekonomian. Oleh sebab itu, sinkronisasi antara pasar dengan regulasi pemerintah yang satu tujuan juga penting untuk menciptakan pasar yang kompetitif dan saling menguntungkan.

Penelitian ini menganalisis korelasi dari peran pemerintah terhadap pasar. Dalam hal ini, perusahaan multinasional berperan sebagai *non-state actor* pada skema pasar. Peran pemerintah adalah sebagai pemangku kebijakan yang merumuskan aturan main terhadap pasar. Sebab, perusahaan multinasional hanya mengikuti aturan main yang telah diterapkan pada negara mereka beroperasi. Dan pada dasarnya, perusahaan multinasional cenderung memiliki kepentingan perekonomian ataupun sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya. Adapun kegiatan operasional dari perusahaan multinasional bergantung kepada negara, sebagai penyedia infrastruktur ataupun suprastruktur politik dan ekonomi. Dalam korelasinya, negara menjadi aktor yang merumuskan kebijakan dalam melegitimasi keberlangsungan pasar, stabilisasi pasar, serta meregulasi pasar dalam transaksi perekonomian (Walzenbach, 2016: 4-5).

Analoginya, entitas dari pemerintah adalah sebagai seorang manajer yang mengatur negara dalam dinamika perekonomian. Sementara itu, pasar berperan krusial dalam dinamika perekonomian pada suatu negara. Dalam hal ini, peran pemerintah diharapkan mampu menyediakan kerangka kebijakan ataupun seperangkat mekanisme yang saling menguntungkan. Sebab, arus globalisasi perekonomian telah menciptakan '*winner*' dan '*loser*' yang mengarah pada isu ketimpangan dalam masyarakat (Walzenbach, 2016: 4). Masyarakat pada umumnya juga berharap bahwa eksistensi dari perusahaan multinasional sudah seharusnya kontributif terhadap negara tempat mereka beroperasi (Walzenbach, 2016: 4-5). Dan pada sejatinya, perusahaan yang beroperasi sudah sepatutnya adaptif terhadap kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah.

Adapun peran pemerintah juga diterapkan melalui pengambilan keputusan, sebagai manifestasi kepentingan politiknya melalui produk kebijakan. K. Pavitt dan W. Walker (1976: 15) dalam "*Government Policies towards Industrial Innovation: A Review*" mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terutama pada entitas perindustrian bersifat krusial. Sebab, pengambilan kebijakan negara terhadap suatu sektor industri sudah seharusnya untuk adaptif terhadap tuntutan akan perkembangan riset dan teknologi yang kompatibel. Demikian pula, peran pemerintah dalam konsep ini secara spesifik ada untuk mempengaruhi suatu entitas industri yang sesuai melalui kebijakan pada sektor industri. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kebermanfaatan kebijakan terhadap industri yang kompatibel, dengan orientasi terhadap keunggulan komparatif (Pavitt & Walker, 1976: 45). Sebab, pemerintah memiliki tanggung

jawab terhadap pengembangan industri yang sesuai. Dalam hal ini pun, industri sangat bergantung dan seringkali sensitif terhadap permintaan pasar dan produksi yang berorientasi terhadap keuntungan.

Selain itu, hal ini juga berkorelasi terhadap sifat permintaan pasar dan faktor produksi. Pada faktanya, operasional perusahaan pada perdagangan bebas masa kini turut menghadapi dinamika pasar dengan ketidakpastian. Oleh karenanya, pemerintah memiliki kewajiban untuk mempengaruhi keberlangsungan industri yang selain berorientasi pada keuntungan juga dapat inovatif terhadap adanya tren skala permintaan industri, selera konsumen, serta layanan publik (Pavitt & Walker, 1976: 42). Pada dasarnya pun, peran pemerintah adalah untuk melayani pasar dan konsumen yang bergantung terhadap kapabilitas pemerintah untuk menciptakan akuntabilitas publik terhadap suatu entitas industri (Pavitt & Walker, 1976: 43). Dalam hal ini, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengkomodasikan infrastruktur terhadap interaksi pasar agar terciptanya kesesuaian pasar dengan kebutuhan.

Sementara itu, rezim perdagangan bebas yang minim intervensi pemerintah juga tetap membutuhkan peran dari pemangku kebijakan. Dalam kerangka formal berupa kebijakan, pemerintah akan selalu turut menciptakan keputusan dimana mereka harus ikut campur tangan dalam inovasi industri. Intervensi ini juga dipertimbangkan berdasarkan tujuan, manfaat nasional, kebijakan alternatif, serta instrumen kebijakan yang tepat (Pavitt & Walker, 1976: 76). Terlebihnya lagi, intervensi pemerintah sudah seharusnya menjamin efektivitas instrumen kebijakan yang telah digunakan untuk mendorong industri

yang inovatif dan berarah kemajuan. Selain dari input yang diteruskan ke dalam kebijakan tersebut, hal yang menjadi tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana hasil dari kebijakan ini bisa tercapai dengan ideal. Kendala ekonomi pun juga membentuk tujuan politik yang memberi kebermanfaatan pada ekonomi, sosial, maupun politik (Pavitt & Walker, 1976: 84-85). Oleh sebab itu, tanggung jawab pada roda perekonomian juga menjadi urgensi dari intervensi pemerintah terhadap suatu entitas industri

Dengan demikian, pengambilan kebijakan pemerintah terutama terhadap sektor yang berkaitan dengan industri akan selalu dibutuhkan, serta menghadirkan dimensi politis dalam perekonomian. Hal ini disebabkan oleh dinamika dan hambatan terhadap keberlangsungan industri. Melalui legitimasinya, pemerintah sebagai pemangku kebijakan sudah sepatutnya menimbang berbagai urgensi dan kebermanfaatan dari setiap perumusan kebijakan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan inovasi terhadap industri yang berlangsung dengan lancar, serta menciptakan keuntungan kompatibel (Pavitt & Walker, 1976: 91). Oleh sebab itu, setiap hasil dari keberlangsungan entitas perekonomian akan selalu bergantung terhadap kapabilitas pemerintah. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah akan berdampak pada inovasi industri di setiap sektor, dan menentukan hasil dari keberlangsungan roda perekonomian. Adapun peran pemerintah juga bermuara pada proses pengambilan keputusan, sebagai manifestasi kepentingan politiknya melalui produk kebijakan.

Dalam proses pengambilan keputusan, penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh David Easton, sebagai landasan konseptual dalam proses

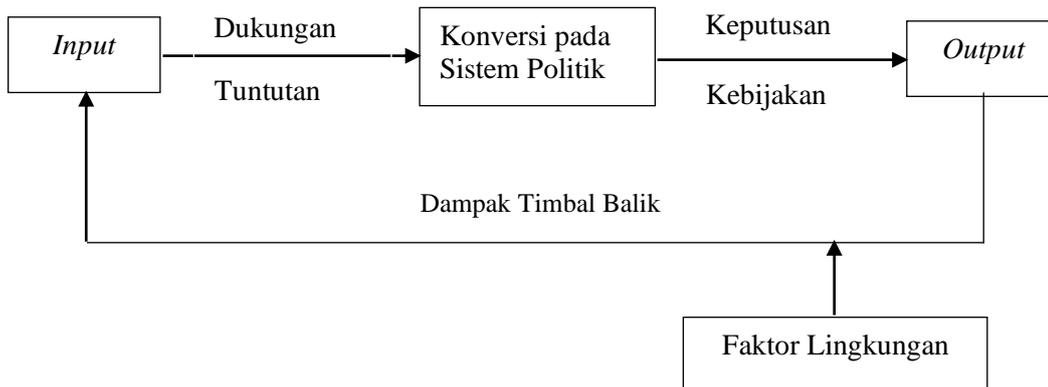
pengambilan keputusan pemerintah sebagai dimensi politik. Gagasan David Easton (1957: 383-384) dalam "*An Approach to the Analysis of Political System*" telah mendefinisikan bahwa sistem politik merupakan suatu fenomena yang menafsirkan sistem kegiatan yang saling keterkaitan dengan mengartikulasikan kepentingan melalui politik praktis. Dalam hal ini, keterkaitan dalam sistem politik berdampak bahwa segala kepentingan akan mempengaruhi segala bentuk pengambilan keputusan pemerintah yang dirumuskan dalam kehidupan bermasyarakat. Singkatnya, politik merupakan dimensi yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Oleh sebab itu kepentingan politik adalah variabel utama dalam proses pengambilan keputusan para pemangku kebijakan.

Proses pengambilan keputusan mengandung interaksi dan interdependensi antara lembaga dan struktur politik. Akan tetapi, interdependensi melibatkan antara kepentingan dengan sistem pemerintahan. Berdasarkan konsep Easton, wewenang pemerintah dalam pengambilan keputusan merupakan produk kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat. Dinamika sistem politik pada dasarnya melibatkan aktivitas operasional institusi, yakni partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah, dan sistem pemilihan (Easton, 1957: 383). Hal ini merupakan fenomena dalam politik praktis, sebagai upaya untuk menggapai kepentingan. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan pemerintah akan selalu meliputi instrumen politik dalam struktur pemerintahan.

Model sistem politik menurut Easton pada dasarnya merupakan suatu sistem yang menekankan hubungan sebab-akibat antar variabel. Proses pembentukan suatu pengambilan keputusan dalam sistem politik meliputi unsur-

unsur *input* dan *output* terhadap suatu kebijakan, yang terbentuk atas dukungan dan kebutuhan. Pada dasarnya, hal ini diidentifikasi sebagai unit sistem politik, dengan batasan-batasan yang tercantum dalam segala bentuk sistem politik. Unit-unit politik merupakan elemen yang ditandai dengan adanya saling ketergantungan antarunit dalam politik praktis. Sementara itu, suatu sistem politik tetap memiliki batasan-batasan yang telah disepakati dengan regulasi yang mengikat terhadap masyarakat (Easton, 1957: 385). Dengan demikian, ketergantungan dalam politik praktis akan terus membangun sistem, dengan perubahan yang akan berdampak pada perubahan dalam sistem politik tersendiri.

Pada prosesnya, *input* dalam suatu kebijakan terbentuk atas dasar tuntutan dan dukungan. Proses *input* merupakan sumber kekuatan dalam sistem politik, yang mengawali terbentuknya suatu kebijakan. Dalam hal ini, tuntutan merupakan suatu aspirasi yang menjadi pertimbangan dalam aktivitas politik (Easton, 1957: 387). Sementara itu, dukungan merupakan permainan politik dalam hal menghimpun kekuatan masa yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan suatu sistem politik (Easton, 1957: 390). Selain itu, Easton (1957: 391-393) juga menjabarkan domain dalam dukungan politik, yakni komunitas politik, rezim, dan pemerintahan. Berdasarkan tuntutan dan dukungan yang akan membentuk pengambilan keputusan melalui politik praktis, peran dari para elit politik dalam tubuh pemerintahan merupakan aktor yang dominan dalam proses ini (Easton, 1957: 392-393). Berdasarkan konsep Easton, penulis merepresentasikan skema alur konsep pemikiran melalui gambar berikut.



Gambar 1.1. Skema Alur Kerja Sistem Politik David Easton.

Sumber: telah diolah kembali dari Easton (1957)

Berdasarkan gambar diatas, proses pembuatan kebijakan juga melibatkan peran pemerintah dalam mengontrol proses perkembangan politik. Proses ini membuktikan dimensi politik yang menentukan suatu kebijakan pemerintah. Skema yang mencerminkan gagasan Easton (1957: 384) mendefinisikan bahwa *input* terbentuk atas tuntutan dan dukungan, yang selanjutnya bertransformasi menjadi sebuah *output* sebagai bentuk dari keputusan ataupun kebijakan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada permainan politik praktis dengan keterampilan untuk mengorganisir dan memobilisasi masa untuk menciptakan pengaruh politik. Dalam keberlangsungan suatu sistem politik, Easton (1957: 386) telah mengemukakan adanya *input*, sebagai elemen yang menentukan suatu keputusan dan atau kebijakan melalui adanya kebutuhan dan dukungan akan kepentingan politik. Sebab, suatu sistem politik tidak akan berjalan tanpa adanya *input*. Selain dari itu, *output* merupakan bentuk dari terciptanya suatu kebijakan,

ataupun pengambilan keputusan. Sebab, *output* akan mengidentifikasi bentuk konkrit yang merepresentasikan sistem politik.

Terlebihnya lagi, *output* akan berputar kembali menjadi *input*, dengan adanya timbal balik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Mekanisme dukungan dalam permainan politik juga merupakan fenomena yang menciptakan *output*, yakni proses terciptanya suatu kebijakan (Easton, 1957: 395). Selain itu, *output* juga menciptakan pengaruh terhadap masyarakat secara turun-menurun, yang bertujuan untuk mempertahankan legitimasi politik (Easton, 1957: 397). Dengan demikian, skema yang telah dijelaskan sebelumnya membuktikan bahwa dimensi politik telah berdampak pada segala aktivitas dalam sistem pemerintahan. Efek timbal baliknya, suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan domestik ataupun lingkungan internasional yang secara dinamis dapat mempengaruhi proses *input* pada sistem politik. Dengan demikian, kebijakan yang pemerintah rumuskan juga dipengaruhi oleh dinamika perdagangan internasional. Sebagai bahan lanjutan, penulis akan menjelaskan konsep perdagangan internasional dalam penelitian ini.

1.5.3. Kebijakan Pasar Bebas

Dalam menjelaskan penelitian dengan lebih komprehensif, penulis juga menggunakan konsep kebijakan pasar bebas sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan pasar. Pasar bebas sejatinya mempengaruhi orientasi suatu negara dalam perdagangan internasional, sebagai proses interaksi perekonomian internasional yang melibatkan aktor negara. Dalam hal ini, perdagangan bebas juga memiliki relevansi terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pada dewasa ini perdagangan

bebas merupakan konsep yang bertentangan dengan kebijakan merkantilisme perdagangan. Berawal dari gagasan Charles Hill dan G. Thomas Hult (2018: 155) dalam bukunya yang berjudul "*Global Business Today*", bahwa pada dasarnya perdagangan bebas mengacu pada situasi di mana pemerintah tidak lagi wajib untuk mengintervensi sektor perdagangan terutama pada aktivitas operasional perusahaan. Sebab, meningkatnya arus globalisasi telah mendorong setiap aktor perekonomian untuk dapat adaptif dalam memaksimalkan efisiensi produksi pada tingkat internasional. Hal ini pun berkorelasi dengan kebijakan pasar bebas untuk tercapainya keunggulan komparatif.

Pada implikasinya, perdagangan bebas berorientasi pada efektivitas dan produktivitas perdagangan, atau keunggulan komparatif pada suatu negara. Hal ini akan tercapai melalui adanya interdependensi perekonomian, keunggulan komparatif, serta mutualisme antar negara melalui perdagangan internasional (Sen, 2010: 2). Pada konsep ini, faktor yang menciptakan sebab-akibat dari proses keberlangsungan perdagangan bebas adalah atas dasar optimalisasi peluang dan potensi dari pasar internasional, efisiensi proses produksi, tingkat konsumsi, kesejahteraan, serta peningkatan kapasitas produksi (Sen, 2010: 3). Dalam hal ini, perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin pesat telah menciptakan proses dan keberjalan perekonomian yang semakin dinamis. Oleh sebab itu, perkembangan zaman dan arus globalisasi telah mendorong seluruh pelaku usaha untuk mengapai keunggulan komparatif akan peluang terhadap keuntungan dari pasar bebas.

Oleh sebab itu, meskipun perdagangan bebas adalah aktivitas perekonomian yang tidak banyak intervensi pemerintah, implikasi yang signifikan dari proses perdagangan internasional juga tidak menutup kemungkinan bahwa kontribusi pemerintah untuk menciptakan kebijakan perdagangan yang strategis juga diperlukan. Dalam hal ini, kapabilitas perusahaan terutama dalam inovasi produk juga merupakan faktor krusial yang menjadi keuntungan dalam menentukan kesuksesan untuk bersaing pada perdagangan internasional yang sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah (Hill & Hult, 2018: 173). Selain itu, adanya peluang dalam pasar bebas merupakan penyebab orientasi negara terhadap keunggulan komparatif. Hal ini juga membuktikan, bahwa pemerintah juga dapat melegitimasi keberlangsungan pasar bebas dengan menciptakan kebijakan yang substansial meskipun pada dasarnya minim intervensi.

Melalui dimensi yang politis, kepentingan negara dalam aktivitas perdagangan bebas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dari perdagangan internasional. Sebab, hal ini dapat meningkatkan produktivitas dari industri dan tenaga kerja dari dua atau lebih pihak yang bekerja sama melalui perdagangan internasional. Dengan demikian, perdagangan internasional memungkinkan setiap negara untuk saling menjalankan simbiosis mutualisme yang akan saling melengkapi satu sama lain (Cavusgil et al, 2017: 148). Oleh sebab itu, aktivitas negara dalam perdagangan internasional bertujuan untuk menciptakan keuntungan komparatif dan saling melengkapi sektor perdagangan. Bahkan, negara adidaya dengan perekonomian terbesar sekalipun akan mengalami kesulitan tanpa adanya perdagangan internasional (Cavusgil et al., 2017: 148).

Terlebihnya lagi, keunggulan komparatif melalui perdagangan internasional tidak hanya menguntungkan negara, perusahaan, maupun warga negaranya, melainkan juga menunjang keberlangsungan hidup yang modern. Keunggulan komparatif sebenarnya ideal untuk diterapkan pada kebijakan negara terhadap pasar bebas. Sebab, keunggulan komparatif menyiratkan bahwa suatu negara tidak perlu menjadi produsen terbaik pertama, kedua, maupun ketiga dari produk tertentu guna menggapai keuntungan dari aktivitas perdagangan internasional. Namun demikian, negara hanya memerlukan kapabilitas dalam memproduksi berbagai jenis barang (Cavusgil et al, 2017: 148). Oleh sebab itu, keunggulan komparatif telah menyiratkan simbiosis mutualisme dengan memantik setiap negara untuk aktif berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan internasional. Singkatnya, keunggulan komparatif adalah persoalan dari bagaimana efektifitas produksi dapat memaksimalkan keuntungan dalam setiap aktivitas perdagangan.

Sebagai implikasinya, konsep ini juga berfokus pada keberlangsungan operasional sebuah perusahaan. Pada kebijakan perdagangan yang strategis, proses afiliasi menjadi penting guna menciptakan efisiensi biaya produksi pada kawasan yang terpisah secara geografis. Situasi seperti ini memang membuktikan pentingnya kebijakan perdagangan strategis, dengan negara yang memiliki keuntungan dalam hal efisiensi proses produksi (Sen, 2010: 9). Dalam hal ini, proses afiliasi juga merupakan bagian dari dinamika perdagangan bebas, dimana sebuah perusahaan multinasional juga mencari peluang pada negara lain, yang bahkan terpisah secara geografis. Sebagai contohnya, ketika perusahaan

multinasional yang memiliki keunggulan untuk memproduksi barang melalui keunggulan kapasitas produksi dengan harga lebih rendah. Hal ini pun juga bertujuan untuk menciptakan interdependensi pasar melalui perdagangan bebas (Sen, 2010: 10). Oleh sebab itu, hal ini merupakan salah satu landasan dari pertanyaan mengapa terjadi afiliasi antar perusahaan multinasional yang beroperasi dalam suatu negara.

Dengan demikian, kebijakan perdagangan bebas juga penting dalam menganalisis bisnis internasional. Sebab, perusahaan merupakan salah satu 'aktor utama' dalam dinamika perdagangan internasional. Secara politis, bisnis internasional memang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku, contohnya melalui kebijakan perdagangan pemerintah (Cavusgil et al., 2017: 194). Oleh sebab itu, perdagangan bebas merupakan salah satu manifestasi kepentingan suatu negara, dengan menciptakan interaksi antara pemerintah dengan perusahaan melalui lobi ataupun kebijakan pada pasar (Hill & Hult, 2018: 177). Dengan kata lain, hal ini telah membuktikan bahwa pasar bebas merupakan faktor krusial yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan keberlangsungan industri pada suatu negara. Pada bagian selanjutnya, penulis akan menjabarkan bagaimana keberlangsungan industri manufaktur kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kebijakan negara.

1.5.4. Kebijakan Pemerintah terhadap Keberlangsungan Industri

Seperti halnya ekonomi yang tidak akan terlepas dari hadirnya dimensi politik. Dalam hal ini, aktivitas dari industri nasional sudah pasti dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan juga bergantung terhadap perdagangan internasional.

Pemerintah menciptakan kebijakan perindustrian, yang di nilai sebagai landasan fundamental dalam proses dan perkembangan industrialisasi dalam suatu negara. Menurut Cimoli et al (2009: 2) dalam jurnal yang berjudul “*The Political Economy of Capabilities Accumulation: The Past and Future of Policies for Industrial Development*” kebijakan industri merupakan landasan ataupun kerangka regulasi yang mengikat para pelaku ekonomi, mekanisme pasar, regulasi operasional perusahaan, serta batas-batas ketentuan yang diatur melalui interaksi pasar. Oleh sebab itu, meskipun kebijakan pemerintah terhadap pasar dipengaruhi oleh dinamika perdagangan internasional, pemerintah tetaplah memiliki kuasa terbesar dalam mengatur keberlangsungan industri nasional.

Pada bahasan selanjutnya, yaitu mengenai bentuk-bentuk legitimasi pemerintah terhadap kebijakan industri dalam dinamika perekonomian. Kebijakan industri sudah sepatutnya bersikap adaptif terhadap berbagai macam hal, seperti halnya peluang dan keuntungan dalam proses perdagangan. Dan pada umumnya, keberlangsungan industri selalu mempertimbangkan untuk mencari peluang terhadap keunggulan komparatif (Cimoli et al., 2009: 3). Terlebih lagi, perkembangan industrialisasi tidak selalu dipengaruhi oleh keunggulan teknologi, maupun infrastruktur. Akan tetapi, juga dipengaruhi oleh kontribusi dan kapabilitas pemerintah untuk melegitimasi dan menciptakan keberlangsungan pasar yang substansial, serta dapat memaksimalkan peluang dalam perekonomian (Cimoli et al., 2009: 4). Dalam hal ini, penulis mengakui pentingnya keunggulan teknologi dan ketersediaan infrastruktur. Namun, legitimasi pemerintah juga

merupakan faktor yang paling krusial dan memainkan peranan penting terhadap industri.

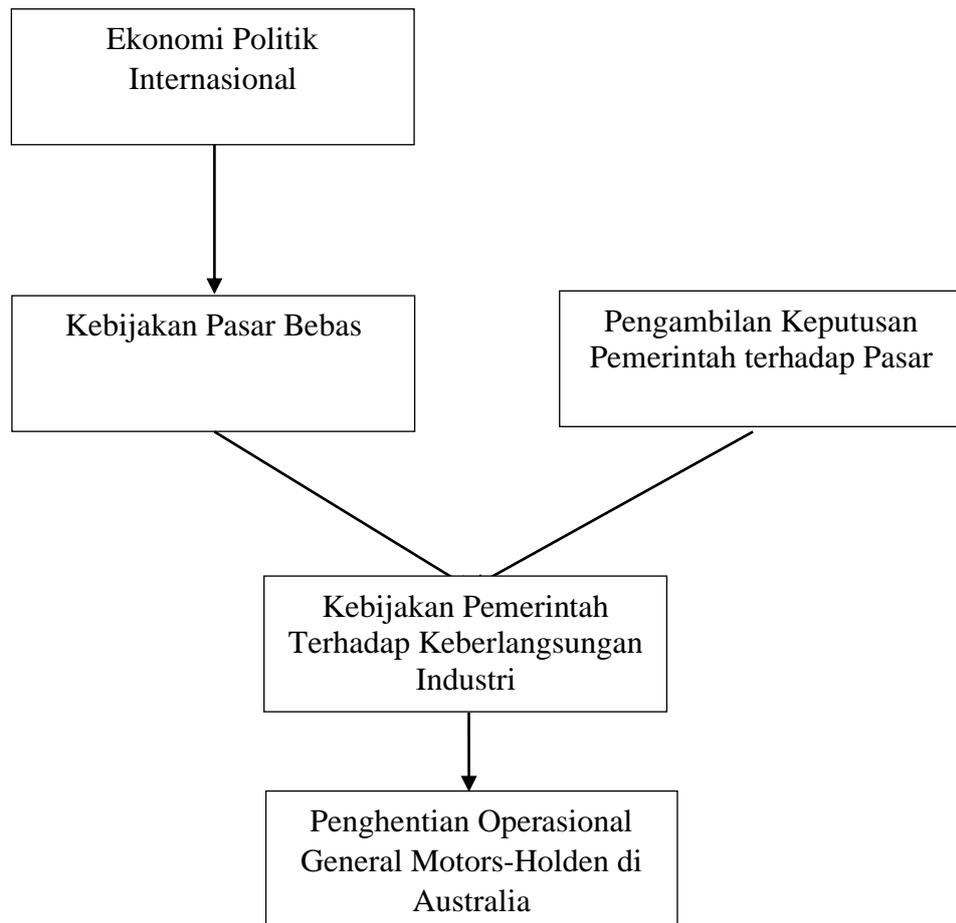
Mengenai kapabilitas dan bagaimana pemerintah melegitimasi perekonomian merupakan faktor paling krusial. Namun, faktor dari keunggulan teknologi ataupun ketersediaan infrastruktur dengan kapabilitas pemerintah merupakan dua variabel utama yang dapat menentukan kesuksesan proses industri nasional. Peran pemerintah tidak hanya terbatas melalui produk kebijakan maupun kerangka regulasinya saja. Pemerintah dituntut agar dapat menjalankan sebuah keberlangsungan industri, dengan dapat memastikan ketersediaan fasilitas ataupun infrastruktur operasionalisasi manufaktur dalam hal riset dan perkembangan teknologi (Cimoli et al., 2009: 8).

Dengan demikian, pemerintah merupakan aktor negara yang memiliki tujuan untuk mengembangkan industri yang substansial dan sesuai kebutuhan. Melalui kebijakan maupun institusi yang relevan dengan industri, pemerintah sebagai dapat menentukan pondasi utama dalam kemajuan sebuah industri, yakni perkembangan teknologi yang relevan serta peluang yang terorganisir (Cimoli et al., 2009: 9). Dalam hal ini, dapat ditegaskan kembali bahwa peran pemerintah dalam industri adalah hal yang krusial. Oleh karenanya, pemerintah sudah seharusnya mampu menciptakan kebijakan yang relevan dengan kepentingan nasional pada keberlangsungan industri.

Terlebihnya lagi, kebijakan industri dalam definisi yang luas merupakan komponen yang menentukan keberhasilan dari proses industri. Begitu pentingnya

namun, hal ini tetap membutuhkan kebijakan makro yang kompatibel, mengenai nilai tukar, perpajakan, kebijakan fiskal, investasi publik, tata kelola pasar tenaga kerja, distribusi pendapatan. Akan tetapi, kebijakan makro yang sesuai dan menguntungkan pelaku industri yang relevan juga diperlukan guna memaksimalkan komponen keberhasilan dari proses industri. Sebab, kombinasi dari kebijakan makro tidak menjamin untuk menguntungkan perkembangan industri dengan efeknya yang bahkan dapat merusak kapabilitas produksi terhadap sektor industri tertentu (Cimoli et al., 2009: 10). Singkatnya, hal ini merupakan aspek-aspek penting ekonomi politik dalam keberlangsungan industri.

Dalam penelitian ini, penulis mengelaborasi teori ekonomi politik internasional, dengan konsep pengambilan keputusan pemerintah terhadap pasar, serta teori perdagangan internasional. Landasan teoritis ini bermuara pada konsep kebijakan pemerintah terhadap pasar untuk menjelaskan fenomena penghentian operasional Holden di Australia. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, penulis merepresentasikan sebuah skema alur konsep penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.2 Skema Alur Pikir Penelitian

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual terdiri atas konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Konsep ini merupakan landasan teoritis dari penelitian, yang terdiri atas:

1.6.1.1. Ekonomi Politik Internasional

Definisi dari ekonomi politik internasional merujuk pada analisis interaksi antara pasar dan negara. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Robert Gilpin (2001) dalam *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, entitas ekonomi sendiri kurang relevan dan kurang komprehensif dalam menganalisis faktor kausalitas antara perekonomian dengan kebijakan pemerintah. Berangkat dari konsep yang telah dikemukakan oleh Robert Gilpin, maka konsep dari penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi sebagai hal yang bersifat politik. Sebab, ekonomi dunia ditentukan oleh dua determinan, yakni pasar dan kebijakan dari suatu negara.

1.6.1.2. Pengambilan Keputusan Pemerintah terhadap Pasar

Konsep pengambilan keputusan mencerminkan peran pemerintah terhadap pasar. Penulis mengelaborasi korelasi dari peran pemerintah yang melegitimasi roda perekonomian terhadap pengambilan keputusan pemerintah. David Easton (1957) dalam "*An Approach to the Analysis of Political System*" mendefinisikan bahwa proses pengambilan keputusan akan melalui sistem politik, yakni interaksi yang saling berkaitan dengan artikulasi kepentingan melalui politik praktis. Proses pembuatan kebijakan meliputi suprastruktur dan infrastruktur politik, yakni aktivitas dari partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah, serta sistem pemilihan. Oleh sebab itu, peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan meliputi kepentingan politik, sebagai variabel utama dalam proses pengambilan keputusan.

1.6.1.3. Kebijakan Pasar Bebas

Pada penelitian ini, penulis mengelaborasi aktivitas perdagangan bebas yang berkorelasi dengan dinamika perdagangan internasional. Charles Hill dan G. Thomas Hult (2018) dalam "*Global Business Today*" menjelaskan bahwa pasar bebas merupakan manifestasi kepentingan negara, dengan adanya interaksi antara negara dengan entitas perekonomian yang dituaikan melalui kebijakan. Adapun kebijakan pasar bebas dalam interaksi perekonomian berupaya untuk menciptakan keunggulan komparatif melalui aktivitas perdagangan internasional. Keunggulan komparatif terbentuk atas simbiosis mutualisme dari setiap negara untuk aktif berpartisipasi dan bersikap oportunistis dalam aktivitas perdagangan internasional.

1.6.1.4. Kebijakan Pemerintah Terhadap Keberlangsungan Industri

Penelitian ini mendefinisikan bahwa kebijakan pemerintah merupakan landasan fundamental dari keberlangsungan industri nasional. Menurut Cimoli et al (2009) dalam "*The Political Economy of Capabilities Accumulation: The Past and Future of Policies for Industrial Development*" menjelaskan bahwa kebijakan industri merupakan landasan yang sifatnya mengikat para pelaku ekonomi dan mengatur mengenai batas-batas ketentuan dalam interaksi pasar. Terlebihnya lagi, persoalan industri dalam artian yang luas juga memerlukan kebijakan makro ekonomi yang kompatibel untuk mendukung seluruh proses keberlangsungan industri. Dalam hal ini, selain faktor keunggulan teknologi dan ketersediaan infrastruktur industri pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur keberlangsungan industri yang substansial dan sesuai dengan kepentingan negara.

Oleh sebab itu, ketersediaan sarana dan prasarana serta kapabilitas pemerintah dalam mengendalikan industri merupakan dua variabel terpenting dalam keberlangsungan industri nasional.

1.6.2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi konsep digunakan untuk memahami istilah serta konsep – konsep yang digunakan dalam penelitian. Terdapat beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1.6.2.1. Ekonomi Politik Internasional

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori ekonomi politik internasional dalam menganalisis fenomena penghentian operasional Holden di Australia. Untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian, definisi operasional yang perlu diketahui adalah:

1. Mempertanyakan bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor ekonomi dengan faktor-faktor yang bersifat politis dalam operasional manufaktur Holden.
2. Implikasi dari seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah Australia terhadap operasional manufaktur Holden.
3. Mempertanyakan apa kepentingan Australia dalam sektor perdagangan internasional pada dewasa ini.

1.6.2.2. Pengambilan Keputusan Pemerintah terhadap Pasar

Dalam menganalisis fenomena penghentian operasional Holden di Australia, penelitian ini menggunakan konsep pengambilan keputusan pemerintah

terhadap pasar. Melalui proses pengambilan data-data penelitian secara komprehensif, maka definisi operasional yang perlu diketahui adalah:

1. Mempertanyakan kepentingan pemerintah Australia yang merumuskan kebijakan terhadap pasar.
2. Mengetahui kegiatan operasional Holden yang bergantung terhadap kebijakan pemerintah Australia, sebagai penyedia infrastruktur ataupun suprastruktur politik dan ekonomi.
3. Mengetahui proses dan pengambilan keputusan pemerintah terhadap penghentian Holden di Australia.

1.6.2.3. Kebijakan Pasar Bebas

Penelitian ini menggunakan konsep teori perdagangan internasional untuk menganalisis faktor sebab-akibat dari fenomena penghentian operasional Holden di Australia. Dengan demikian, data yang diperlukan untuk menjadi substansi penelitian adalah:

1. Mengetahui fokus sektor perdagangan internasional Australia pada dewasa kini.
2. Mempertanyakan mengapa Australia membuka perdagangan bebas yang dimulai sejak tahun 2005.
3. Mempertanyakan alasan dari General Motors sebagai induk perusahaan Holden yang memutuskan untuk berhenti berafiliasi dan memberikan bantuan finansial terhadap Holden.

1.6.2.4. Kebijakan Pemerintah Terhadap Keberlangsungan Industri

Konsep kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri merupakan elaborasi atas konsep peran pemerintah terhadap pasar dan teori perdagangan internasional yang menciptakan peran pemerintah untuk mengatur keberlangsungan industri pada skala nasional. Oleh sebab itu, melalui proses penelitian yang lebih mendalam diperlukan data sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pemerintah Australia dapat mempengaruhi keberlangsungan industri nasional.
2. Mempertanyakan mengapa pemerintah Australia tidak lagi melindungi General Motors Holden sebagai perusahaan nasionalnya.
3. Mengetahui faktor politis apa yang mendorong manufaktur Holden untuk menghentikan operasionalnya.

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kajian teori yang telah digunakan, penelitian ini dapat menjelaskan bahwa penghentian operasi Holden memang didorong oleh pemerintah Australia melalui kebijakan yang tidak bersahabat. Sebab, disamping faktor minimnya daya saing perusahaan terhadap kompetitornya juga terdapat faktor-faktor politik yang mempengaruhi penghentian operasional Holden. Peran dari para pemangku kebijakan di Australia melalui Button Car Plan pada tahun 1985 menjadi awal mula kemunduran Holden yang kesulitan untuk adaptif terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian, melemahnya nilai dolar Australia pada tahun 2013 menjadi klimaks yang telah menyebabkan pemerintah Australia menghentikan bantuan finansial terhadap

Holden yang sebenarnya berguna untuk menyelamatkan operasionalnya. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Australia telah mendorong Holden untuk segera tutup pada 2021 dan industri otomotif nasional tidak lagi menjadi prioritas pemerintah Australia.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena penghentian operasional manufaktur Holden di Australia. Adapun penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif, dengan mencari data substantif yang mengandung makna. Dalam hal ini, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, sebagai data valid yang menjadi suatu nilai dibalik data yang ada (Sugiyono, 2013).

Secara definitif, studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang diperoleh dan bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan juga menjelaskan sebuah fenomena secara komprehensif (Kriyantoro, 2006: 18-19). Singkatnya, metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini akan memungkinkan penulis untuk melakukan eksplorasi sebuah fenomena secara komprehensif dan data valid yang didapat akan mendukung peneliti untuk mengelaborasi data yang diperoleh.

Singkatnya, penelitian kualitatif, peneliti berupaya untuk mendapatkan validasi penelitian melalui data valid yang komprehensif, dan saling terelaborasi. Dengan demikian, dalam metode penelitian kualitatif ini secara spesifik mengelaborasi data yang diperoleh dari beberapa studi kasus.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dengan mekanisme penelitian dengan menghasilkan data yang bersifat eksplanatif dengan menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, serta kausalitas antar variabel berdasarkan subjek yang diteliti (Sugiyono, 2017: 6). Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan dan pengaruh dari setiap variabel dengan menjelaskan secara komprehensif dari rumusan masalah “Mengapa faktor politis ikut menjadi penyebab penghentian operasional Holden di Australia?” untuk menciptakan hipotesis penelitian.

1.8.2. Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan situs penelitian di wilayah Australia. Situs penelitian ini sesuai dengan judul dan topik penelitian, yakni “Fenomena Penghentian Operasional Holden di Australia”.

1.8.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua subjek penelitian, yang terdiri atas:

1. General Motors-Holden, sebuah manufaktur kendaraan pada pasar otomotif Australia
2. Pemerintah Australia, sebagai pihak memiliki kekuatan untuk melegitimasi perekonomian melalui setiap perumusan kebijakan.

1.8.4. Jenis Data

Sebagai rujukan, penulis akan mengklasifikasi jenis data yang sudah diperoleh dalam proses penelitian. Secara definitif, sumber data dalam metode

penelitian kualitatif pada umumnya akan meliputi peristiwa, lokasi, narasumber, teks berupa lisan maupun tertulis, serta artefak (Nughrhani, 2014: 212). Dalam hal ini, penulis akan menggunakan jenis data primer maupun data sekunder sebagai klasifikasi dari sumber data maupun informasi yang telah diperoleh dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif, yang bersumber pada jurnal, berita, artikel, serta studi pustaka.

1.8.5. Jangkauan Penelitian

Dalam mengetahui jangkauan penelitian, batasan, deskripsi kasus dan fenomena, serta analisis data, tinjauan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan sejak tahun 2013 pada saat terjadi kenaikan nilai mata uang dolar Australia hingga tahun 2021, dimana Holden telah memutuskan untuk tutup. Dalam kurun waktu tujuh tahun tersebut telah terjadi proses penghentian operasional manufaktur Holden di Australia, yang melibatkan peran pemerintah melalui kebijakannya terhadap operasional suatu manufaktur.

1.8.6. Sumber Data

Penelitian ini idealnya menggunakan data primer yang didapat langsung dari sumber yang berkaitan, sebagai validasi data penelitian. Namun, faktor keterbatasan geografis membuat peneliti kesulitan untuk mendapatkan data primer terhadap kasus penelitian. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan data yang didapat dari studi pustaka yang diperoleh dari buku, jurnal, berita, dan artikel. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan berita

yang berkaitan dengan dengan faktor-faktor dari fenomena penghentian operasional pabrikan Holden.

1.8.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah riset melalui internet (*online research*) yang termasuk di dalam teknik pengumpulan *desk research* dengan mengelaborasi antara data sekunder dengan landasan konseptual penelitian. Penulis akan menggunakan studi literatur yang bersumber dari berbagai referensi buku, jurnal, artikel, serta berita yang sesuai. Dengan demikian, penulis akan menganalisis substansi penelitian berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari data sekunder.

1.8.8. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kongruen. Metode kongruen adalah sebuah metode dimana peneliti mencoba untuk mencari relevansi antara teori dengan data – data empiris yang telah diketahui. Teori Ekonomi Politik Internasional akan menjadi alat analisis terhadap data – data yang telah dikumpulkan penulis untuk disajikan dalam pembahasan. Data yang akan disajikan tersebut merupakan data yang berkesesuaian dengan teori dan hipotesis penulis.

1.8.9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I**

Bab I merupakan merupakan bagian pendahuluan penelitian yang memuat mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat beserta kontribusi penelitian secara akademis dan secara praktis, lalu landasan teori yang dirancang sebagai kerangka berfikir, kemudian hipotesis penulis, dan metode penelitian yang terdiri atas tipe penelitian, teknik pengumpulan dan teknis analisis data, serta sistematika penulisan dari penelitian.

2. **BAB II**

Bab II berfokus pada deskripsi kasus penelitian. Bab II akan menjelaskan mengenai informasi umum mengenai Holden dan kiprahnya pada industri otomotif di Australia. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang operasional General Motors-Holden di Australia. Lalu penulis juga akan mendeskripsikan perkembangan perusahaan, serta masa-masa kemunduran operasional Holden dalam industri otomotif Australia. Sebagai elaborasinya, penulis juga akan menjelaskan mengenai peran pemerintah terhadap keberlangsungan dari industri otomotif Australia.

3. **BAB III**

Bab III akan menganalisis faktor-faktor politis yang mempengaruhi penghentian operasional manufaktur Holden. Pada BAB III ini penulis akan berfokus pada entitas bisnis dan politik yang saling bergantung. Penelitian ini mengelaborasi entitas antara ekonomi dengan politik dengan menganalisis peran dan pengaruh pemerintah yang

melatarbelakangi penghentian produksi Holden. Faktor-faktor politis yang dimaksud seperti diberlakukannya Button Car Plan pada tahun 1985, dibukanya keran impor kendaraan sejak 2005, serta pemerintah Australia yang tidak lagi mendukung operasional Holden. Berdasarkan faktor kausalitas yang telah ditemukan, penulis akan mengembangkan untuk dijadikan sebagai hipotesis penelitian yang merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.

4. **BAB IV**

Bab IV merupakan bab penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, beserta kritik dan saran konstruktif yang diperlukan untuk mengevaluasi penelitian. Di dalam bab ini berisi masukan – masukan bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian ataupun pengembangan penelitian dengan topik yang sama.